

Tantangan *Ryousai Kenbo* dalam Menyeimbangkan Pekerjaan

Rima Novita Sari

Universitas Darma Persada

rimanov.unsada2020@gmail.com

ABSTRAK

Ryousai kenbo created as country ideology to encourage women in Japan for not giving up their role as a mother. However, as the expansion of modernization, many opportunities for women to have career outside domestic roles are freely open. Today, *ryousai kenbo* could be considering as obstacle to aim women's domestic role stability and social equality. The aim of the study is to identify the obstacle of balancing work life as *ryousai kenbo* and career women in Japan. This study is a qualitative approach by using analysis of article in media and survey. Theory is qualitative descriptive to find the analysis result. The method used is analysis of news article and survey. Based on the results, this study concludes the obstacle of women for work-life balance between *ryousai kenbo* and career women with four facts, which are 1) gender wages gap, 2) *ryousai kenbo* roles are limited to child rearing and house work, 3) mother as a career woman is facing difficult from resignation, 4) several regular regulations could not be implemented due to concerns of social pressure at work.

Kata kunci : *Ryousai Kenbo*, Keseimbangan Pekerjaan, Ibu Bekerja di Jepang

PENDAHULUAN

Jepang diakui sebagai salah satu negara dengan modernisasi tercepat di Asia. Perkembangan serta kemajuan ini terwujud melalui peran aktif pemerintah serta dukungan penuh masyarakat dan kedisiplinan yang dapat diterapkan. Kesuksesan pendidikan menjadi salah satu faktor dalam perkembangan modernisasi. Shizuko (2013:32) menjelaskan *ryousai kenbo* sebagai gambaran pendidikan perempuan sebagai seorang ibu. Ideologi *ryousai kenbo* tercipta melalui pendidikan pada tahun 1899 yang terhubung dalam ide negara sebagai keluarga (*Family Nation*) dan Politik Nasional Jepang. Idealnya, prakarsa *ryousai kenbo* memperjuangkan kesetaraan antara pekerjaan perempuan dan laki-laki, yaitu perempuan mengerjakan pekerjaan domestik sedangkan laki-laki mencari nafkah di luar. Ideologi ini tidak hanya ada ketika masa masyarakat sebelum perang (*pre-war society*), namun juga di masyarakat pasca perang (*post-war society*). Lebih jauh lagi, ideologi ini ada di dalam masyarakat modern di Jepang.

Sosok perempuan dapat memperluas dunia dan menggunakan pengetahuan dengan bijak untuk mengajari anak mereka. Tugas sebagai *ryousai kenbo* dapat menjadi harapan bagi perempuan di dunia, namun implementasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai peran perempuan dalam domestik dan fertilitas.

Yakuwari buntan ishiki merupakan sebuah gagasan terhadap pembagian peran perempuan sebagai ibu dalam mengatur rumah tangga dan merawat anak sedangkan laki-laki adalah sosok yang dapat bekerja di luar rumah serta menata karir. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya modernisasi serta tingginya angka pendidikan perempuan di Jepang, maka pemikiran modern semakin berkembang serta gagasan tersebut lambat laun mengalami pergeseran. Beberapa fenomena diskriminasi bagi ibu bekerja dituliskan dengan jelas melalui kritik media. Ibu bekerja dapat mengalami diskriminasi sejak awal kehamilannya atau ketika telah diketahui memiliki seorang anak. Hal ini merupakan permasalahan sosial yang harus diatasi karena adanya fenomena *soushika* (kurangnya generasi muda) dan *koureika* (lebih banyak generasi tua) memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki peran seimbang sebagai ibu dan pekerja. Selain perempuan diharapkan melahirkan generasi penerus, berbagai ranah pekerjaan mengharapakan perempuan untuk turut berpartisipasi.

Sebagai *ryousai kenbo*, perempuan berperan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, namun sebagai individu juga memiliki harapan berkarir. Hal tersebut tercermin melalui data angka pekerja perempuan di Jepang yang semakin meningkat sejak tahun 2000. Keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga telah dituliskan melalui *equal employment opportunity law (EEOL)* yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang sejak tahun 1985. Pemerintah Jepang pun telah mengatur aturan cuti bagi perempuan hamil selama satu tahun dan diperbolehkan kembali bekerja setelah merawat anak-anak. Salah satu implementasi yang bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap perempuan yang bekerja adalah melalui aturan *womenomics*. Harapan perempuan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan profesional sangatlah tinggi, namun ideologi serta gagasan turun-temurun terhadap ruang domestik mereka dengan tidak sadar menciptakan ruang diskriminasi. Bagaimana sosok perempuan dapat menyeimbangkan diri dalam keseimbangan peran ibu dan pekerjaan merupakan permasalahan yang dapat ditinjau lebih jauh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pustaka, analisis data-data survey yang dikeluarkan oleh kementerian atau survey lembaga sosial

lainnya, dan analisis kritis media untuk mendapatkan informasi kondisi yang terjadi. Menurut Muslim (2015: 81), kualitatif adalah pendekatan berlandaskan fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

PEMBAHASAN

a. Pendidikan *Ryousai Kenbo* di Jepang

Tahun 1868 merupakan transisi menuju zaman Meiji dan Jepang berproses menjadi negara modern dalam berbagai sektor seperti teknologi atau pendidikan. Dukungan pemerintah salah satunya menerbitkan berbagai tulisan agar masyarakat semakin gemar membaca serta memahami pentingnya pendidikan terhadap perempuan. Beberapa tulisan tersebut antara lain :

- a. Laporan yang dituliskan secara resmi oleh beberapa *han* (daerah atau pemilik tanah) yang membangun sekolah perempuan.
- b. Laporan kepada Kaisar dari *Kaitakushi*, yaitu pemerintah yang kemudian menjadi Hokkaido dan membangun sekolah khusus perempuan pada tahun 1871.
- c. *Tokon chakushu no junjo* yang ditulis oleh siswa pada tahun 1872 diterbitkan oleh kementerian pendidikan.
- d. Artikel atau *shinpo* yang ditulis oleh David Murray pada tahun 1873. Ia menjabat sebagai penasihat pendidikan dari kementerian pendidikan Amerika saat itu. Murray menulis dalam artikelnya bahwa seorang ibu memiliki kekuatan yang hebat dalam mempengaruhi anak mereka.
- e. Tulisan Mitsukuri Shuhei berjudul “*a discussion of education*” atau *kyoikudan* yang diterbitkan oleh majalah *Mei roku* pada bulan Mei, tahun 1874.
- f. Tulisan Mori Arinori berjudul “*on wives and concubines*” bagian 4 atau *saishouron no yon* pada bulan November, tahun 1874.
- g. Tulisan Nakamura Masanao berjudul “*an argument for the creation of good mothers*” atau *zenryō naru haha o tsukuru setsu* pada bulan Maret, tahun 1875.

Pendidikan untuk perempuan mengalami perkembangan pesat setelah perang Sino-Jepang sekitar tahun 1894, yaitu menitikberatkan pendidikan untuk menjadi *ryousai kenbo*. Pada awalnya, pemikiran ini disesuaikan dengan kondisi Jepang agar tidak menyerah terhadap peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu. Namun demikian, interpretasi serta implementasi satu arah mengakibatkan terbatasnya pilihan hidup perempuan yang dituangkan dalam pendidikan

dan desakan pemerintah. Pada awal pendidikan perempuan, tidak diberikan pendidikan pelajaran bahasa klasik Cina, sejarah, fisika dan kimia, dan hukum dan ekonomi. Bahasa asing pun diberikan sebagai pelajaran pilihan saja. Mayoritas pendidikan bagi perempuan adalah merawat rumah, menjahit, dan musik. Dengan demikian, pemerintah Jepang telah mengatur pendidikan sedemikian rupa untuk menciptakan generasi *ryousai kenbo*.

	Five-Year Schools					Four-Year Schools			
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Morals	2	2	2	1 (2)	1 (2)	2	2	1 (2)	1 (2)
Japanese (<i>kokugo</i>)	6	6	6	5	5	6	6	5	5
Foreign Languages	3	3	3	3	3	3	3	3	3
History and Geography	3	3	3	2	2	3	3	2	2(3)
Mathematics	2	2	3 (2)	3 (2)	3 (2)	2	2	3 (2)	3 (2)
Science	2	2	3 (2)	3 (2)	3 (0)	2	2	3 (2)	3 (1)
Drawing	1	1	1	1	0 (1)	1	1	1	0 (1)
Domestic Science			2	4				2	4 (2)
Sewing	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Music	2	2	1 (2)	1 (2)	0 (2)	2	2	1 (2)	0 (2)
Physical Education	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Totals	28	28	28*	28	28	28	30	30	30

Gambar.1 Perbandingan jam pendidikan di kelas selama satu minggu.

Sumber : Shizuko, Koyama. *Ryousai kenbo The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan*, Boston. Brill, 2013.

Pada dasarnya, *ryousai kenbo* adalah filosofi memperlakukan perempuan sebagai anggota individual di dalam keluarga. Hal ini tidak secara langsung berhubungan dengan negara dan bangsa. Menurut Shizuko (2013:49), *ryousai kenbo* dan hubungan negara-bangsa menjadi terhubung dibawah pengaruh ideologi keluarga bangsa yang menempatkan negara (negara-bangsa kekaisaran) sebagai lanjutan dari rumah tangga (konsep *ie*, patriarki rumah tangga *Meiji civil code*).

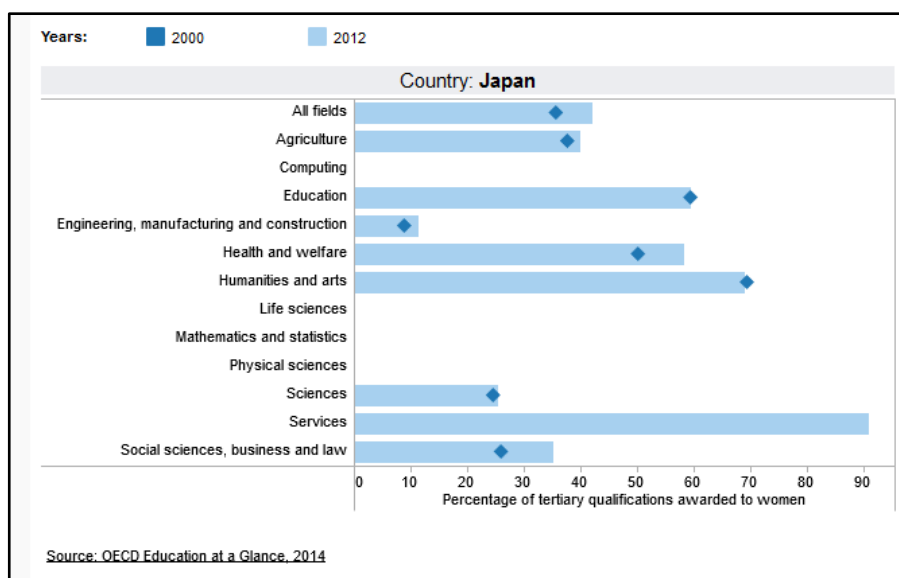
Laki-laki dan perempuan berbeda dalam fungsi mereka masing-masing seperti reproduksi seksual dan perbedaan fisiologi, psikologi, serta peran yang harus mereka laksanakan. Menjadi istri dan ibu untuk perempuan adalah karir dan menjadi suami dan ayah untuk laki-laki yang harus mencari nafkah juga merupakan karir, dan ini adalah pembagian kerja yang tidak dapat dihindari. Ideologi *ryousai kenbo* sesungguhnya menolak perbedaan hak tersebut atau menolak pandangan bahwa laki-laki itu terhormat dan perempuan itu hina. Dengan kata lain, karena laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam fisik dan psikologi maupun perannya masing-masing, mereka terlihat memiliki persamaan saling memperkuat

nilai. Pada ideologi *ryousai kenbo*, nilai sebagai istri atau ibu tidak berlaku hanya di dalam rumah tangga namun juga berlaku bagi bangsa dan negara. Secara tidak langsung perempuan dapat berkontribusi kepada negara melalui perannya mendidik anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Perempuan juga diharapkan menggunakan pengetahuannya untuk mendukung pekerjaan suami.

Telah dituliskan dalam buku teks pelajaran sekolah ketika itu yang berjudul *Meiji Onna Imagawa* bahwa dasar dari suatu negara adalah rumah tangga dan dasar dari rumah tangga adalah seorang perempuan. Perempuan yang hebat akan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga. Oleh karena itu, *Meiji Onna Imagawa* menggambarkan sosok ibu sebagai pendidik anak-anak dan memainkan peran itu dari perspektif bangsa dan negara.

Sejak diberlakukan hukum pendidikan baru tahun 1948, pendidikan perempuan mulai merangkak naik. Perempuan yang menjalani pendidikan sampai sekolah menengah atas naik menjadi 42.5% pada tahun 1948, dan menjadi 90% pada tahun 1975. Selama tahun 1961 sampai 1975, persentase naik dari 60% sampai 90%. Tentu saja jika dibandingkan dengan masa sebelum perang dunia ke-II maka jumlah ini meningkat drastis. Perempuan yang mendapatkan pendidikan mulai mengikuti jejak pendidikan laki-laki di tahun 1969, bahkan ketika tahun 1970, persentase ini lebih tinggi.

Dewasa ini, survey yang diadakan untuk negara kelompok OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) menunjukkan perkembangan perempuan Jepang telah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama pada tingkat Universitas. Ketika hukum pendidikan pertama kali diciptakan, pendidikan wajib bagi perempuan terutama di sekolah menengah pertama ditujukan untuk menanamkan ideologi negara. Namun, perempuan Jepang telah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi meskipun persentase jumlahnya tidak sebanyak negara OECD lainnya. Melalui Gambar. 2, jurusan perguruan tinggi yang dipilih perempuan di Jepang saat ini sangat bervariasi dan bahkan hampir merata di berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Data tertinggi yang dihimpun hingga tahun 2012 menyatakan pendidikan perempuan lebih banyak berada pada sektor jasa. Oleh karena itu, pendidikan bagi perempuan untuk menjadi *ryousai kenbo* telah berkembang dari implementasi sekolah menengah pertama hingga ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Universitas.



Gambar. 2 Persentase kualifikasi tertier bagi perempuan dalam bidang pendidikan di Jepang

Sumber : OECD(*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

b. Konsep Keibuan di Jepang

Perkembangan konsep nilai perempuan dalam perannya sebagai Ibu di Jepang sejak zaman Edo diharuskan memiliki empat nilai keutamaan (*shiko*), antara lain :

1. *Futoku (Feminine Virtue)* – Nilai penampilan wanita.
2. *Fugen (Feminine Speech)* – Bahasa yang digunakan wanita.
3. *Fuyo (Feminine Form)* – Penampilan, berpakaian, dan kelakuan yang pantas untuk wanita.
4. *Fuko (Feminine Skill)* – Skill praktek yang pantas bagi wanita.

Namun, konsep ini seharusnya telah bergeser dari posisinya di masyarakat Jepang sebagai masyarakat modern. Konsep sejak zaman Edo dianggap terpengaruh oleh konfusianisme terutama konsep ‘yin dan yang’. Konfusianisme adalah suatu pandangan hidup yang menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya naturalistik yang berada dalam diri manusia (Achmadi 2012, 93). Sylvia (1997, 181-182) memberikan garis besar lima peran perempuan di suatu negara yang terdiri atas :

1. Sebagai produsen biologis suatu grup etnis.
2. Sebagai produsen batas etnis atau grup nasional.
3. Sebagai peserta utama dalam kaitannya dengan ideologi reproduksi suatu grup dan sebagai pemancar kebudayaan itu.

4. Sebagai penanda etnis atau perbedaan nasional – sebagai suatu fokus dan simbol ideologi diskursus yang digunakan sebagai konstruksi, reproduksi, dan transformasi dari suatu etnis atau kategori nasional.
5. Sebagai anggota dalam suatu negara (nasional), ekonomi, politik, dan perjuangan militer.

Ideologi *ryousai kenbo* mengharapkan perempuan sebagai ibu bagi anak-anak serta generasi masa depan negara Jepang. Ideologi ini terkait pula dengan reproduksi dari suatu grup, dan dalam hal ini berkaitan dengan bangsa dan negara, serta sebagai pengajar kebudayaan setempat. Bagi masyarakat Jepang yang menganut sistem *ie* (konsep rumah tangga Jepang), konsep keibuan merupakan sebuah penghormatan individu serta sebagai pengajar struktur keluarga. Pengantin perempuan dan menantu diharapkan dapat menjadi ibu serta melahirkan penerus keluarga. Konsep keibuan yang muncul beserta pengaruh sistem *ie* menilai perempuan dalam kapasitas fertilitas mereka.

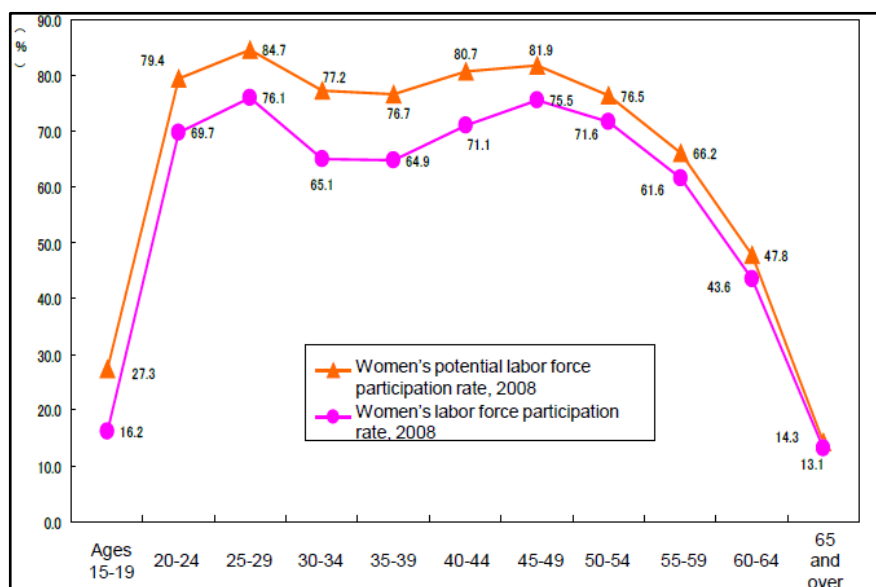
Arah hidup modern telah menggeser pola pikir tradisional atas dasar fertilitas perempuan. Perempuan di Jepang dewasa ini telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan dapat memiliki kesempatan karir dan kehidupan finansial yang stabil. Sylvia (1997:6) dan Shirahase (2014:117) menyatakan bahwa gender domestik perempuan merupakan produksi rumah tangga serta bentuk eksploitasi atas dasar pengecualian peran perempuan di ruang publik. Media turut andil dalam mengangkat berbagai pertimbangan mengenai pertumbuhan kesetaraan. Sejalan dengan hal tersebut, perempuan di Jepang memiliki harapan tinggi untuk dapat berkontribusi atau memiliki karir yang positif di dalam suatu manajemen tingkat tinggi.

c. Analisis Media dan Survey Terhadap Tantangan Ibu Bekerja di Jepang

Japan: The worst developed country for working mothers? merupakan kritik sosial bagi pemerintah Jepang atas kekhawatiran keseimbangan peran ibu rumah tangga dan ibu bekerja di Jepang. Seorang pengacara profesional dihadapkan pada pilihan untuk keluar dari pekerjaan dan merawat ketiga anaknya serta mengabdikan diri sebagai *ryousai kenbo*. Bahkan lebih jauh, pasangan orang tua ini tidak dapat mengambil hak *parental leave* karena khawatir bahwa perusahaan akan menyulitkan posisi pekerjaan mereka. Memperkuat kritik ini, data *Ministry of Health, Labour, and Welfare Japan* menyatakan hanya 2.63% orang Jepang yang mengambil cuti orang tua hingga tahun 2010. Tulisan dalam media tersebut memberikan gambaran bagi negara Jepang bahwa ideologi *ryousai kenbo* yang terskonstruksi pada zaman tertentu serta hak ibu sebagai individu perempuan dalam mendapatkan pekerjaan terasa sulit untuk berjalan

berdampingan. Pada tahun 2014, *The Japan Times* menuliskan bahwa “*Foreign women also face ‘maternity harassment’ : Laws protect working women before and after childbirth but awareness is far from universal*” untuk menuliskan kritik sosial mengenai *maternity harassment* di Jepang yang mengalami kenaikan persentase dari 20.5% menjadi 62.3%. Memperkuat artikel tersebut, Anjelia (2018: 88-89) menjelaskan dalam tulisannya mengenai artikel terhadap analisis Ayaka Shiomura dalam *The Japan Times* mengenai pelecehan verbal oleh anggota dewan pria ketika anggota dewan wanita memberikan pidato di depan dewan majelis Tokyo Metropolitan. Ayaka Shiomura dipaksa menerima pelecehan verbal ketika memperjuangkan dukungan bagi wanita hamil dan ibu yang sedang merawat anak mereka. Anggota dewan pria tersebut telah mempertanyakan mengenai “cepatlah anda menikah, apakah anda tidak bisa hamil?”, dan seketika pernyataan tersebut menimbulkan polemik yang besar di masyarakat.

Melalui, data *Ministry of Health, Labour, and Welfare Japan*, ilustrasi menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja akan berhenti bekerja setelah menikah karena tidak adanya dukungan dan fasilitas perusahaan seperti yang diutarakan oleh Jacqueline bahwa “generasi perempuan di awal abad 20 cenderung berhenti dari pekerjaan purna waktu untuk memiliki anak, atau ketika mereka menikah” (Jacqueline 2012, 62).

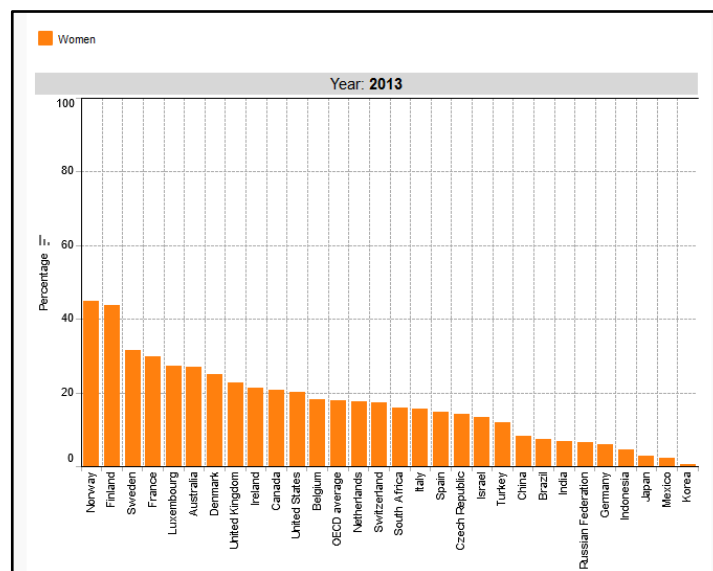


Gambar.3 Situasi perempuan bekerja. 2010. *Ministry of Health, Labour, and Welfare Japan*

Gambar. 3 menunjukkan grafik pekerja perempuan di Jepang yang dianggap unik apabila dibandingkan dengan negara OECD lainnya. Grafik telah membentuk seperti huruf M dan

menunjukkan bahwa perempuan Jepang mulai bekerja di usia 15 tahun sampai 29 tahun, tetapi mengalami penurunan sejak usia 29 tahun sampai 39 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan Jepang yang telah bekerja, harus berhenti bekerja setelah menikah. Faktor pernikahan dan memiliki anak dianggap sebagai alasan utama bagi perempuan Jepang untuk tidak melanjutkan karir. Oleh karena itu, tidaklah tabu bagi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perempuan di Jepang bekerja hanya untuk menunggu pernikahan. Lambat laun, Jepang dihadapkan pada situasi kekurangan generasi muda karena perempuan yang ingin memiliki karir tidak ingin menikah serta adanya pergeseran usia menikah, namun menyebabkan usia kehamilan yang tidak produktif.

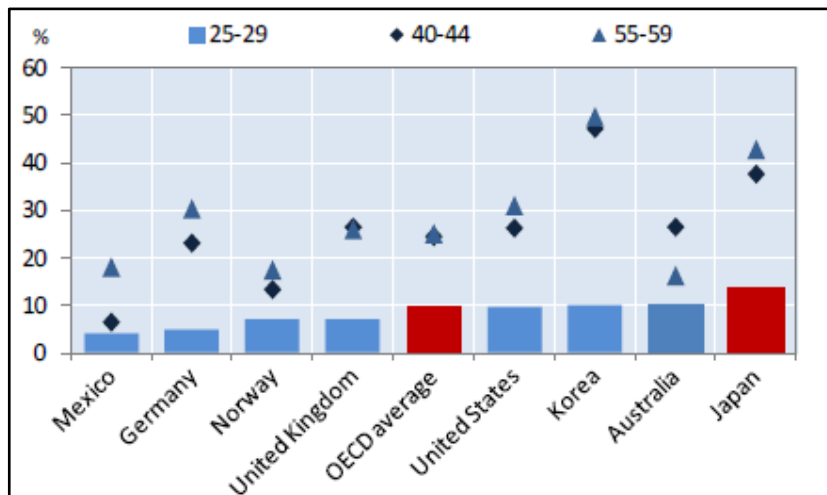
Sampai tahun 2013, Jepang telah menempati posisi tiga terbawah sebagai negara dengan perempuan yang berada pada posisi manajerial terendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara seperti Norwegia yang menempati urutan teratas. Selain Jepang, tiga negara terbawah lainnya adalah Korea dan Meksiko.



Gambar.4 Persentase kualifikasi tertier bagi perempuan dalam bidang pendidikan

Sumber : Situs OECD

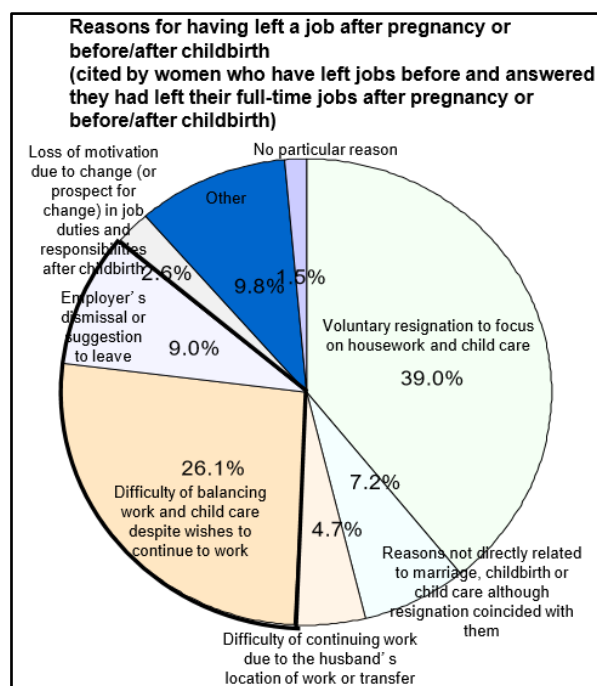
Kendala lain yang dapat menimbulkan tantangan terhadap ibu bekerja adalah faktor upah yang diterima. Ditinjau dari survey negara OECD, Jepang menempati urutan kedua setelah Korea terhadap perbedaan upah antara pekerja pria dan wanita. Rata-rata perbedaan upah pria dan wanita mencapai 63,5% (Mariko 2012, 48).



Gambar. 5 Perbandingan upah berdasarkan gender

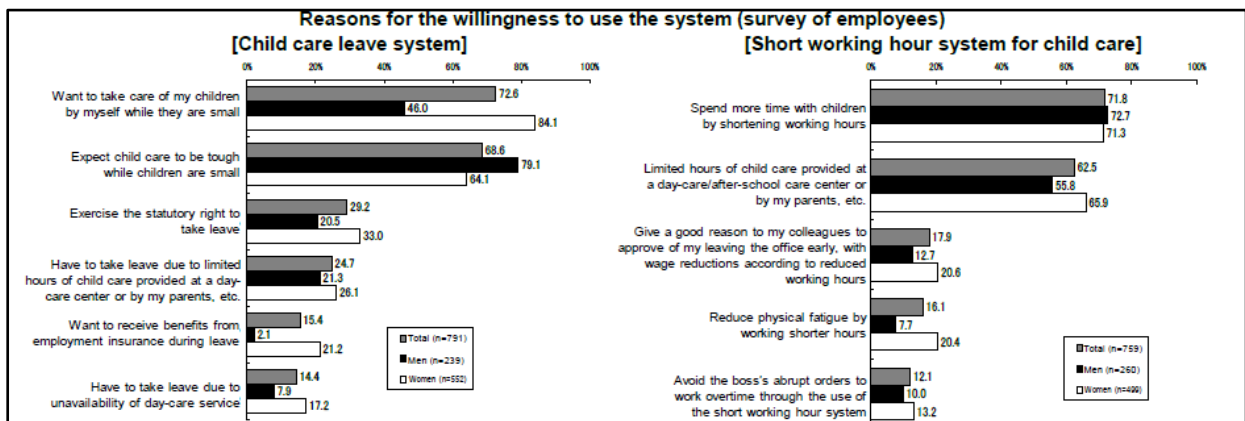
Sumber : Situs OECD

Melalui gambar 5, Jepang menempati urutan terendah kedua setelah Korea dalam perbedaan upah berdasarkan gender. Usia perbedaan upah di Jepang terutama diterima oleh perempuan berusia 55 tahun sampai 59 tahun, yaitu mereka yang bekerja paruh waktu. Sesuai grafik M, perempuan Jepang akan berhenti bekerja setelah menikah atau ketika berusia 29 tahun keatas, sehingga mereka akan bekerja sebagai pekerja paruh waktu setelah usia anak-anak mereka cukup untuk ditinggalkan.



Gambar. 6 Alasan berhenti bekerja setelah memiliki anak. 2010.
 Ministry of Health, Labour, and Welfare Japan

Gambar 6. Menunjukkan hasil survey sebanyak 65.4% responden para ibu yang bekerja, kemudian berhenti bekerja karena jam kerja yang membuat mereka tidak dapat membagi waktu dalam menjaga dan membesarkan anak. Bagi perempuan di Jepang, tampaknya diberikan dua pilihan yaitu menikah dan memiliki anak, kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan profesional, atau tidak menikah sama sekali dan tetap bekerja. Lebih lanjut, 26,1% sebagai suara jawaban tertinggi menunjukkan bahwa perempuan sulit untuk mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan merawat anak, meskipun sesungguhnya mereka ingin kembali bekerja, sedangkan 39% jawaban perempuan adalah sukarela mengundurkan diri karena ingin merawat rumah tangga dan anak.



Gambar. 7 Alasan menggunakan cuti menjaga anak. 2010.
 Ministry of Health, Labour, and Welfare Japan

Survey pada Gambar. 7 menyatakan keinginan para orang tua untuk mengambil cuti merawat anak. Sesungguhnya para orang tua termasuk ibu dan ayah di Jepang ingin diberikan kesempatan untuk merawat anak mereka. Hukum memberikan cuti untuk merawat anak ingin digunakan oleh para perempuan, namun pertimbangan akan adanya tekanan pekerjaan membuat enggan untuk menggunakannya. Sementara itu, alasan utama pria untuk menggunakan hukum ini adalah keinginan adanya jam waktu yang lebih singkat. *Salaryman* di Jepang seringkali lembur hingga tengah malam. Hal tersebut menyulitkan mereka untuk merawat anak mereka yang masih kecil, dan para pekerja pun enggan menggunakan sistem hukum ini karena kekhawatiran akan posisi dan karir mereka.

Kendala yang dapat menimbulkan diskriminasi ini merupakan masalah sosial di berbagai negara, namun hasil survey terhadap Jepang masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Terlepas dari peran aktif pemerintah Jepang menetapkan hukum bagi masalah ini, diskriminasi terhadap ibu yang bekerja masih saja terjadi. Ketimpangan sosial yang terjadi tidak hanya dari upah yang diterima, tetapi dapat juga melalui diskriminasi verbal.

Kritik sosial media lainnya melalui *The Japan Times* pada Oktober 2016 yang menuliskan *Japan slides to 111th in WEF Gender Equality Rankings* menyoroti kegagalan Jepang dalam mengangkat kesetaraan gender. Survey *The Global Gender Gap Report 2016* oleh *World Economic Forum (WEF)* menyatakan meskipun pemerintah berusaha memberikan perempuan peran di masyarakat, namun pada kenyataannya negara Jepang hanya memberikan sumbangsih yang sedikit. Yamaguchi dalam *inequality gender 2019* menyatakan bahwa eksistensi karir perempuan di Jepang merupakan perluasan dari peran domestik, dimana perempuan adalah staff dalam bidang pendidikan anak-anak, merawat, dan pendukung kesehatan lainnya.

The main careers open to Japanese women are extensions of women's traditional family roles, such as children's education, nursing, and other supportive roles in health care. Employers in Japan ought to acknowledge that the workplace is not an extension of gender divisions at home, but rather a place for individuals to fulfill their potential and contribute to society. But such an acknowledgment, for the most part, remains to be seen.

Tantangan bagi seorang ibu adalah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan agar dapat membagi waktu untuk merawat anak. Namun demikian, keinginan untuk kembali bekerja sangatlah besar. Keprihatinan Yamaguchi terhadap hal tersebut tertuang dalam pemikirannya bahwa pemerintah Jepang seharusnya dapat menciptakan kondisi terbaik untuk *work life balance*. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengubah sikap bahwa merawat anak dan merawat rumah tangga bukanlah tugas perempuan saja.

KESIMPULAN

Ryousai kenbo pada awalnya diprakarsai sebagai wujud dukungan pemerintah atas penghargaan peran ibu dalam tugasnya sebagai pendidik anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan baik akan siap bersaing di dalam masyarakat internasional. Seorang guru yang baik dari sektor dasar, yaitu rumah tangga, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan proses pendidikan. Akan tetapi, ideologi tersebut pada jamannya dianggap satu arah hingga membatasi gerak ruang perempuan untuk memiliki karir di luar fungsi rumah tangga. Menuju

masyarakat modern, kesempatan pendidikan lebih tinggi terbuka bagi setiap lapisan masyarakat tanpa memandang gender. Tahun 2013, survey OECD menyatakan bahwa lulusan universitas perempuan lebih tinggi dengan persentase 67% dibandingkan lulusan universitas laki-laki yang berjumlah 56%. Tantangan bagi perempuan yang telah mendapatkan pendidikan lebih tinggi adalah mendapatkan posisi manajerial yang lebih baik.

Setelah berkeluarga, perempuan pun tetap dihadapkan pada ideologi yang telah tercipta sejak zaman Meiji tersebut. Marjinalisasi perempuan adalah peran domestik. Ketimpangan ini dibuktikan melalui data survey yang menunjukkan bahwa 1). Ketimpangan upah berdasarkan gender. Upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan upah pekerja laki-laki. 2). Tuntutan perempuan menjadi *ryousai kenbo*, khusus dalam peran domestik 3). Ibu bekerja dihadapkan pada pilihan mengundurkan diri dari pekerjaan karena tekanan eksternal 4). Beberapa aturan hukum yang merupakan hak asasi ibu pekerja tidak dapat dilaksanakan karena kekhawatiran tekanan sosial di tempat kerja. Menjadi *ryousai kenbo* bisa saja kewajiban atau hak setiap perempuan, namun memiliki pendidikan tinggi serta pekerjaan yang stabil adalah harapan setiap manusia tanpa memandang gender. Beberapa data survey serta media menjelaskan tantangan untuk menyeimbangkan *ryousai kenbo* sebagai ibu yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Asmoro.(2012). *Filsafat Umum*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Mariko, Bandou.(2012). *Kuni de Miru Nihon no Josei* : Data Bank. Tokyo : Zaimushou Insatsu Kyoku
- Scott, Jacqueline, Shirley Dex, and Anke C. Plagnol. (2012). *Gendered Lives Gender Inequalities in Production and Reproduction*. Massachusetts USA : Edward Elgar Publishing, Inc.
- Shirahase, Sawako. (2014). *Social Inequality in Japan*. New York : Routledge
- Shizuko, Koyama. (2013). *Ryousai kenbo : The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan*. USA : Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
- Sugiyama, Takie. (1984). *Japanese Women*. United States of America : University of Hawaii Press
- Walby, Sylvia. (1997). *Gender Transformations*. New York : Routledge

Jurnal

- Anjelia, Yasinta Melinda dan Putri Elsy. (2018). Analisis Konteks Sekuhara Verbal Anggota Parlemen Ayaka Shiomura dalam Surat Kabar *Online Mainichi Shimbun* dan *The Japan Times*. *Japanology Vol.6* : Universitas Airlangga.

Molony, Barbara. (1995). Japan's 1986 Equal Employment Opportunity Law and the Changing Discourse on Gender. *Jurnal Signs* vo. 20 no. 2 : The University of Chicago Press.

Internet

BBC. "Japan: The worst developed country for working mothers?", <http://www.bbc.com/news/magazine-21880124> (diakses 25 Oktober 2016).

Ministry of Health, Labour, and Welfare. "Introduction to the revised Child Care and Family Care Leave Law", <http://www.mhlw.go.jp/english/policy/affairs/dl/05.pdf> (diakses 25 Oktober 2016).

International Monetary Fund. 2019. Japan's Gender Gap, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/gender-equality-in-japan-yamaguchi.html> (diakses 7 Februari 2021).

Japan Policy Brief OECD. 2015. Inequality : Greater Gender Equality for more Inclusive Growth, <https://www.oecd.org/policy-briefs/japan--greater-gender-equality-for-more-inclusive-growth.pdf> (diakses 7 Februari 2021).

The Japan Times. Japan slides to 111th in WEF Gender Equality Rankings, <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/26/national/social-issues/japan-slips-10-notches-111th-wef-gender-equality-rankings/> (diakses 26 Oktober 2016).

The Japan Times. "Foreign women also face maternity harassment", <http://www.japantimes.co.jp/community/2014/07/07/issues/maternity-harassment-hurts-holds-back-foreign-women/#.WA39pDVLDIU> (diakses 25 Oktober 2016).

The Japan Times. "From bad to worse : Japan slides 11 places to 121st in global gender equality ranking", <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/17/national/social-issues/japan-121st-global-gender-equality-ranking/> (diakses 6 Februari 2021).